

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Achmad Batinggi. 1999. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ahmad Ghufron,SH. dan Drs. Sudarsono, SH. , 1991, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Albrow, Martin. 1989. *Birokrasi, Alih Bahasa M. Rusli Karim dan Toto Daryanto*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, , Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dr. Murtir Jeddawi, 2008, *Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, Pembinaan PNS*, Watampone: Total Media.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo
- Hasibuan, Malayu S.P, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Husni, L. (2005). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta; PT Raja Grasindo.
- Joko J. Prihantmoko ,2008, *Men Demokratiskan Pemilu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Mahmud, M.P (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Mertokusumo, S (2009). *Penemuan Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Meylani, & rahayu, W. (2012). *Ensiklopedia Bahasa Indoneia I*. Jakarta: PT Mediantara Semesta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon,1994,*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya,Gadjah Mada University Press.
- Siagian, Sondang P, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Racmahwati, Ike Kusdyah, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Mazuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Press.

Ryaas Rasyid, Muhammad, 1997, *Kajian awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Jakarta: mipi Yarsif Watampone.

Thoha, Miftah, 1993, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*, Yogyakarta: MW Mandala.

Tjokrowinoto, M., dkk, 2001, *Birokrasi Dalam Polemik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang PNS yang Menjadi Pengurus/Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan lain-lain.

### **Jurnal-Jurnal**

Mat Zudi, Arief Hidayat, Untung Sri Hardjanto, (2012). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01.

S.F Marbun, (2012). Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 05.

Agus Mulya Karsona, (2016, Maret). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 23.

Bagus Sarnawa, (2017, Juni). Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 24.

- Irene Ave Rina, Yos Johan Utama, Ayu Putriyanti, (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang (Studi kasus Putusan MA No. 009/G/2015/ PTUN SMG). *Jurnal Hukum. Vol. 06*.
- Tedi Sudrajat, Sri Hartini, (2017, Oktober). Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 29*.
- Dudung Sumandumin, (2002, Agustus). *Profil Birokrasi Pemerintah Dalam Semangat Otonomi Daerah*.
- Fikran Kasmayuda, Florence Daicy Jetty Lengkong, (2004). Pengaruh Implementasi Kebijakan Netralitas PNS Terhadap Kualitas Pelayanan Politik di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado.
- I Gede Pranajaya, (2015, Desember). Pengaturan Pengangkatan Sekertaris Daerah Untuk Mewujudkan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 04*.
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, (2017, Oktober). Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 29*.